

**HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DAN SIKAP
TERHADAP KEBIJAKAN KONVERSI MINYAK TANAH KE
GAS DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN INDUSTRI
RUMAH TANGGA**

**(Studi Tentang Sikap Pelaku Industri Rumah Tangga Di Sentra Industri Kue
Cangkiang Kec. IV Angkek dan Lukok Kubang Putiah Kec. Banuhampu
Kab. Agam Mengenai Kebijakan Konversi Minyak Tanah Ke Gas)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

Oleh:

FAUZIAH HARNOM

04193054



**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

ABSTRAK

Fauziah Harnom, 04193054, Hubungan Antara Pengetahuan dan Sikap Terhadap Kebijakan Konversi Minyak Tanah Ke Gas Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Industri Rumah Tangga (Studi Tentang Sikap Pelaku Industri Rumah Di Sentra Industri Kue Cangkiang Kec. IV Angkek Dan Lukok Kubang Putih Kec. Banuhampu Kab. Agam Mengenai Kebijakan Konversi Minyak Tanah Ke Gas), Pembimbing :Drs Tamrin, M.Si dan Drs. Syaiful, M.Si, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Oktober-November, 2008, 101 halaman, 11 buku, 4 skripsi, 5 artikel internet.

Penelitian ini melihat sikap pelaku industri rumah tangga di Cangkiang Kec IV Angkek dan Lukok Kubang Putih Kec. Banuhampu mengenai kebijakan konversi minyak tanah ke gas yang di hubungkan dengan pengetahuan para pelaku IRT terhadap kebijakan konversi. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep sikap, konsep kebijakan, dan konsep pembangunan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan tipe deskriptif. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah kuisioner dan dokumentasi. Sedangkan analisa data menggunakan program SPSS 15.00 dengan analisa data menggunakan analisis frekuensi dan tabulasi silang.

Dari data yang didapat dilapangan, diketahui bahwa hampir seluruh pelaku industri rumah tangga mengetahui adanya kebijakan konversi minyak tanah ke gas dan memahami kebijakan tersebut. Sedangkan sikap yang dilihatkan oleh pelaku IRT adalah berimbang. Dan hasil pengujian hipotesa menunjukkan tidak ada hubungan tingkat pengetahuan dengan sikap pelaku IRT terhadap kebijakan konversi minyak tanah ke gas. Sikap positif yang muncul dari penelitian karena responden setuju tujuan dari kebijakan konversi minyak tanah ke gas adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sedangkan sikap negatif responden, tidak setuju jika kebijakakan konversi dijadikan sebagai solusi dalam menghadapi kelangkaan BBM, karena gas juga sering langka di kota-kota besar di Indonesia. Walaupun tingkat pengetahuan pelaku IRT baik terhadap kebijakan ini, akan tetapi tidak langsung membuat mereka mendukung kebijakan konversi minyak tanah ke gas.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi dan liberalisasi ekonomi telah membawa pembaruan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Bersamaan dengan kondisi negara yang belum stabil karena sedang mengarah keperbaikan itu, ternyata globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia bergerak begitu cepat, dan sayangnya negara-negara majulah yang cenderung lebih banyak memanfaatkan kesempatan dibandingkan dengan negara-negara sedang berkembang. Hal ini dimungkinkan karena negara maju jauh lebih siap menghadapi era globalisasi, dibandingkan dengan negara berkembang.

Salah satu faktor yang juga sering menekan dan berpotensi merugikan negara-negara berkembang karena ketidaksiapannya tersebut yaitu adanya isu-isu baru yang mempengaruhi kegiatan industri, antara lain adalah pengkaitan isu demokrasi, penanganan hak-hak azasi manusia (HAM), perburuhan, lingkungan hidup, dsb. Dalam situasi yang seperti itu, maka untuk mempercepat proses industrialisasi, menjawab tantangan dari dampak negatif gerakan globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia, serta mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang, pembangunan industri nasional memerlukan arahan dan kebijakan yang jelas. Kebijakan yang mampu menjawab pertanyaan, arah dan bangun industri

Indonesia dalam jangka menengah, maupun jangka panjang. Tanpa adanya arah dan kebijakan industri nasional yang disepakati bersama, maka perkembangan industri akan tumbuh secara alami tanpa kejelasan bentuk bangun industri yang akan terjadi.

Keadaan demikian akan menimbulkan dampak pemborosan sumber daya pembangunan dan tidak terwujudnya tujuan pembangunan industri yang diinginkan. Oleh sebab itu, mengacu pengalaman beberapa negara lain bahwa mereka berhasil memajukan industrinya, karena adanya suatu kebijakan industri nasional yang didukung bersama oleh seluruh potensi bangsa secara konsisten. Dengan demikian pembangunan industrinya akan lebih mudah mencapai keberhasilan, serta meredam tekanan-tekanan yang datang dari luar.

Oleh sebab itu, dengan mengacu pada Bangun Industri 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, kelompok pengembangan industri prioritas yang akan menjadi fokus pengembangan baik jangka menengah maupun jangka panjang, yaitu Pengembangan Sepuluh Klaster Industri Inti, Pengembangan Industri Terkait dan Penunjang dari Kesepuluh Industri Inti, Pembangunan Industri Andalan Masa Depan, serta Beberapa Cabang Industri Kecil dan Menengah Tertentu.¹

Kebijakan sektoral atau cabang industri sektoral tertentu harus tuntas termasuk merencanakan pengembangan skala-skala industrinya dari kecil, menengah dan besar. Dengan demikian yang dimaksud dengan Industri Kecil Tertentu dalam topik yang diuraikan disini yaitu Industri Kecil Menengah (IKM)

¹ www.depperindag.go.id/kebijakan/09kpin. Kebijakan Sektor Industri. Jumat, 23 Mei 2008.

yang secara keberadaannya berskala kecil atau menengah. Kelompok industri yang dimaksud umumnya berhubungan dengan seni, keragaman suku bangsa, agama, bahasa, adat-istiadat, budaya, dsb, sehingga kelompok ini memiliki ciri produksinya berupa kerajinan dan barang seni atau produk-produk yang berhubungan dengan industri pariwisata.²

Secara umum, pembangunan industri kecil dan menengah tertentu ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Penyerapan tenaga kerja
- b. Meningkatkan ekspor
- c. Penyebaran pembangunan industri

Dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud, strategi pembangunan yang akan ditempuh adalah peningkatan teknologi mutu dan disain produk, peningkatan penguasaan pasar ekspor (pemasaran) dan memfasilitasi terhadap sumber pendanaan. Terdapat 6 (enam) cabang industri yang akan diprioritaskan dalam pengembangan kelompok IKM Tertentu yaitu:³

- a. IKM Kerajinan dan Barang Seni;
- b. IKM Batu Mulia dan Perhiasan;
- c. IKM Gerabah/Keramik Hias;
- d. IKM Garam Rakyat;
- e. IKM Minyak Atsiri;
- f. IKM Makanan Ringan.

² Ibid.
³ Ibid.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai tingkat pengetahuan dengan Sikap Pelaku Industri Rumah Tangga Di Sentra Industri Kue Cangkiang Kec. IV Angkek dan Lukak Kubang Putihah Kab. Agam mengenai kebijakan konversi minyak tanah ke gas, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa jumlah responden yang menunjukkan sikap positif dan negatif adalah sama yaitu 50%. Sikap positif ini menggambarkan bahwa para pelaku Industri Rumah Tangga (IRT) menyetujui penetapan kebijakan konversi minyak tanah ke gas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Sedangkan sikap negatif menggambarkan penolakan karena pelaku takut menggunakan gas dalam industri. Dari data yang didapat bahwa responden menilai kebijakan ini tidak menguntungkan bagi industri kecil. Ini disebabkan pelaku IRT harus membeli peralatan baru yang nantinya bisa menambah ongkos produksi, karena dalam industri ini mereka tidak hanya bisa dengan menggunakan 1 tabung gas.
2. Dilihat dari tingkat pengetahuan responden mengenai kebijakan konversi minyak tanah ke gas adalah baik. Akan tetapi pengetahuan ini tidak menentukan sikap pelaku IRT untuk langsung setuju dengan kebijakan

konversi. Karena semakin tinggi pengetahuan seorang terhadap suatu objek tidak akan membuat orang itu akan langsung setuju dengan objek tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini seimbang mengenai sikap pelaku IRT yaitu 50 % untuk sikap positif dan 50 % untuk sikap negatif, dan hasil dari tingkat pengetahuan pelaku IRT adalah baik, artinya sikap yang muncul dari pelaku IRT terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai konversi minyak tanah ke gas tidak dipengaruhi oleh pengetahuan responden. Oleh sebab itu perlu adanya sosialisasi oleh pemerintah mengenai manfaat kebijakan ini, karena pengetahuan responden yang baik akhirnya dapat menghasilkan sikap yang positif terhadap kebijakan.
2. Perlu adanya penelitian lanjutan mengenai kebijakan konversi minyak tanah ke gas dengan mempertimbangkan faktor tingkat pendidikan masyarakat, karena latar belakang pendidikan seseorang mempengaruhi pengetahuan mereka mengenai manfaat suatu kebijakan yang nantinya dapat menentukan sikap masyarakat terhadap suatu kebijakan.
3. Seharusnya ketika kebijakan konversi ini ditetapkan di suatu daerah sebaiknya disertai dengan infrastruktur pendukung, seperti adanya agen penyalur gas elpiji agar pelaku IRT mudah mendapatkannya, tersedianya gas saat dibutuhkan atau tidak terjadi kelangkaan yang akan membuat industri ini

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku Teori

- Sumawinata, Sarbini. 2004. *Politik Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta :PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sobur, Alex. 2003. *Psikologi Umum* .Bandung: Pustaka Setia
- Syamsi, Ibnu.1987. *Ensiklopedia Umum Dan Pembangunan*. FISIP, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta..
- Mantra, Ida Bagoes. *Filsafa Penelitian & Metoda Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Relajar.
- Rukminto, Isbandi Adi. 1944. *Psikologi, Pekerjaan Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosila, Dasar-dasar Pemikiran*.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Buku-Buku Metodologi

- Bungin, Burhan. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta; Kencana.
- Budi, Triton Prawira. 2006. *SPSS 13.0 Terapan; Riset Statistik Parametrik*. Yogyakarta : ANDI.
- Faisal, Sanapiah. 2005. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.